

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afri Yendra, 2014, **Memahami Undang-Undang Desa**, Sukabina Press, Padang.

-----, 2015, **Memahami Undang-Undang Pemerintah Daerah**, PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa**, Depati Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Rahayunir Rauf dan Sri Maulidah, 2016, **Badan Permusyawaratan Desa**, Zanafa Publishing, Riau.

Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta.

J. Kaloh, 2007, **Mencari Bnetuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ni'matul, 2015, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang

RDH Koesoemahatmadja, 1979, **Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Alumni, Bandung

Dt. Bandaro, H. CH. N. Latif, dkk. (ed.), 2004, **Minangkabau yang Gelisah: Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda**. Bandung: CV. Lubuk Agung

Taufiqurrahman, 2008, **Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan**, Universitas Mustopo Beragaman

Pemerintah Nagari Tabek, 2022, Profil Nagari Tabek, Nagari Tabek

B. Disertasi, Skripsi, Jurnal, Makalah dan sejenisnya

Thomas, 2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kabupaten Tana Tidung, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Mulawarman.

Mustika AJi, 2014, Panduan Penyusunan APB-Desa Menuju Masyarakat Desa yang Sejahtera dan Berkeadilan, Universitas Bina Insani.

Nunuk Riyani, 2016, Analisis Pengelolaan Dana Desa, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa DI Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, PJIH vol.4 no 3 2017, [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

Findy Yanel Mamesah. 2014, Peranan Badan Permsyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Desa Sendangan Kecamatan Tompas), Skripsi, Fakultas Hukum UNiversitas Sam Ratulangi Manado.

Dian Haryani, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Perspektif vol.8 no. 1 2015.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam

**Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik, Vol I,
2016, Nomor 6.**

Gusha Menri, Skripsi: *“Kewenangan Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di
Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat”*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa**

**Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa**

**Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permasyarakatan Desa**

Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

**Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa**

**Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Nagari**

**Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Nagari**

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan
Rencana Kerja Pemerintah Nagari

**Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.**

**Peraturan Nagari Tabek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tabek Tahun 2022.**

D.Website

<https://masjidsyura.com/2021/09/27/nagari-tabek-kecamatan-pariangan-gelar-musrenbang-nagari-tahun-anggaran-2022/>, dikunjungi pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 14.35

Pengertian Otonomi Daerah, <https://kompas.com?pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya>, diakses pada tanggal 18 Februari pukul 18.15.

Ayu Isti Prabandari, “Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian”, <https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2>, dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2020 Jam 15.16.

www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/0/_/0._induk.kec.pdf

<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2673/nagari-pemerintahan-adat-minang-kabau-sumatra-barat>. Diakses tanggal 03 Januari 2022.

http://digilib.uin-suka.ac.id/16964/2/11340065_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf. diakses tanggal 03 Januari 2022

<https://mozaikminang.wordpress.com/2011/11/21/minangkabau-dalam-sejarah-dan-tambo/>. diakses tanggal 2 Januari 2022 pukul 14.00.

Pengertian

Perencanaan,

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-perencanaan.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021 jam 10.42

<https://tanahdatar.go.id/kecamatan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022 jam 10.19

<https://langgam.id/nagari-tabek-pariangan-kabupaten-tanah-datar/>, diakses tanggal 13 Maret 2022 pukul 14.45

<https://tanahdatarkab.bps.go.id/indicator/12/91/1/penduduk-kec-pariangan-per-nagari.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 20.00

